

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana Strategi Keterpilihan Calon Anggota Legislatif Perempuan PDI - Perjuangan pada Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Temanggung. Hal ini menjadi sesuatu hal yang penting dikarenakan dalam kenyataan yang terjadi sekarang masih banyak hal yang belum mencerminkan kesetaraan gender di daerah khususnya di Kabupaten Temanggung.

Keterlibatan perempuan dalam urusan politik sangat berbeda dengan kondisi perempuan di masa lalu yang berjuang secara sembunyi-sembunyi. Perbedaan itu terjadi karena kondisi sosio-kultur maupun perkembangan zaman, dimana pada masa sekarang perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam turut serta membangun negara. Salah satu contohnya dapat dilihat di dalam parlemen, dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Namun, jumlah kaum perempuan di parlemen sangat sedikit dibandingkan dengan kaum pria atau biasa disebut dengan politik-maskulinitas. Di seluruh dunia, kaum perempuan hanya menempati 14,3 persen dari total anggota parlemen yang ada<sup>1</sup>. Dari data lembaga legislatif di tingkat pusat, perempuan hanya 8,8% (44 orang dari 500 anggota DPR RI), sementara 11% perempuan menduduki jabatan sebagai pemimpin partai politik<sup>2</sup>. Sesungguhnya jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum

---

<sup>1</sup> Women in Parliament: 2002. Beyond Numbers. Hal. 12

<sup>2</sup> Women and Politics Compilation of Reference: NDI. 2001

telah ada sejak disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, tanggal 17 Agustus 1945, dalam pasal 27 ayat 1, yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal tersebut senada dengan ketentuan dalam konvensi PBB tentang hak-hak politik perempuan, yaitu:<sup>3</sup>

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi;
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi;
3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.

Kedudukan perempuan di dalam parlemen tidak kalah pentingnya dengan pria karena di dalam parlemen, perempuan dapat mewakili suara-suara dan masalah-masalah perempuan yang berguna bagi kemajuan bangsa dan Negara. Tetapi sampai saat ini perempuan masih belum banyak diberi kesempatan yang lebih untuk merubah kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Untuk dapat terlibat dalam segala aspek kegiatan politik bagi perempuan tidaklah mudah. Kondisi perempuan Indonesia seperti sekarang ini terbentuk oleh adanya kendala yang menghambat partisipasi politiknya. Kendala

---

<sup>3</sup> Romany Sihite. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal.156

pokok yang sering sekali dipergunakan sebagai alasan lemahnya partisipasi politik perempuan yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal.

Pertama, faktor internal dari kaum perempuan itu sendiri. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri perempuan sendiri yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh pada tingkat partisipasi perempuan dalam politik, terdiri atas:<sup>4</sup>

1. Adanya anggapan di kalangan perempuan bahwa politik itu penuh kekerasan sehingga dipandang sebagai dunianya laki-laki, sehingga perempuan enggan berkecimpung di dalamnya;
2. Banyak perempuan tidak senang berorganisasi;
3. Perempuan kurang memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya bahkan perempuan sendiri kadang-kadang menenggelamkan dirinya dalam dunia domestik sibuk dalam rumah tangga; dan
4. Perempuan sering kurang percaya diri, sehingga tidak siap mental dan psikologis untuk memasuki dan melaksanakan fungsi-fungsi jabatan sebagai perumus kebijakan maupun pengambil keputusan.

Kedua, adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri perempuan sendiri. Berdasarkan pengamatan secara faktual, terlihat bahwa perempuan masih lebih banyak menjadi objek ketimbang menjadi subjek dalam segala hal. Ini disebabkan oleh banyak faktor yang salah satunya berasal dari budaya patriarki yang telah berhasil mengerdilkan jiwa dan mengikis kepercayaan

---

<sup>4</sup> Siti Hariti, Satriyani. 2009. *Gender and Politics*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hal.203

diri kaum perempuan. Kesan bahwa dunia politik adalah dunia laki laki masih melekat. Kesan ini berkembang karena *image* yang mungkin tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik, bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik dan semacamnya. Faktor lain yang dinilai menjadi kendala seorang perempuan untuk terjun langsung ke politik dan turut aktif dalam pengambilan keputusan adalah sumber dana. Sebagai contoh, dalam fenomena pemilihan calon legislatif, sudah merupakan konsumsi publik bahwa untuk dapat melenggang ke parlemen membutuhkan “mahar” politik yang sangat besar. Seorang calon legislatif (caleg) mau tidak mau wajib merebut hati konstituennya melalui strategi *marketing* politik dengan biaya yang tidak murah.<sup>5</sup> Dapat dilihat bahwa yang menjadi persoalan adalah bahwa proses demokratisasi yang dilakukan oleh negara Indonesia masih belum memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan perempuan terutama di bidang politik.

Dalam kehidupan berdemokrasi, peranan partai politik secara sederhana dapat diartikan sebagai *representation of idea*, yaitu bertindak untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat/tuntutan yang bersaing, serta menyediakan sarana kompromi bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan *legitimate*. Dalam konteks parpol sebagai “jembatan” komunikasi antara rakyat dan pemerintah (yang berkuasa), maka partai politik melalui jajaran struktural partai pada berbagai tingkatan administratif secara aktif menjadi bagian dalam kehidupan sosial dan politik dalam suatu entitas masyarakat tertentu. Sebagai salah satu institusi demokrasi yang memegang

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal.203

peranan penting dalam proses demokrasi, maka partai politik dapat menempatkan posisinya secara aktif dan kreatif dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya. Para calon yang akan duduk di dalam lembaga legislatif terlebih dahulu dikader di dalam partai politik, tak terkecuali para calon legislatif perempuan.

Sejarah tentang representasi perempuan di parlemen Indonesia merupakan sebuah proses yang panjang tentang perjuangan perempuan di wilayah publik. Pada tahun 1928 terjadi Kongres Wanita Indonesia pertama yang membangkitkan semangat rasa rasionalisme di kalangan perempuan. Kongres tersebut menjadi awal bagi perempuan Indonesia dalam menjalankan perannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan dunia politik. Dalam pemilihan umum pertama yaitu pada tahun 1955 ada 6,3 persen anggota parlemen perempuan. Kemudian representasi perempuan Indonesia di parlemen mengalami pasang surut, pada tahun 1987 mencapai angka tertinggi yaitu 13,0 persen. Pada periode 1992-1997 jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR sebanyak 62 orang atau sekitar 12,5 persen. Namun pada tahun 1997-1999 turun menjadi 54 orang atau sekitar 10,8 persen. Pada saat reformasi, disaat bangsa ini bertekad untuk mewujudkan demokrasi yang lebih sehat, yaitu pada periode 1999-2004, justru mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 46 orang atau hanya 9 persen. Terjadi peningkatan pada periode 2004-2009 dimana wakil rakyat sudah dipilih langsung oleh rakyat Indonesia dengan pemilihan umum (pemilu) yaitu jumlah perempuan 61 orang dengan persentase 11,10 persen. Pada periode 2009-2014 jumlah perempuan Indonesia di parlemen adalah 101 orang dengan persentase 18 persen dari seluruh anggota perwakilan terpilih. Sedangkan untuk periode 2014-2019 jumlah perempuan

Indonesia di sebanyak 97 orang yang berarti telah terjadi penurunan yaitu sebesar 0,68%, padahal jumlah caleg perempuan pada periode 2014-2019 lebih banyak dari periode sebelumnya yaitu sebanyak 38%. (Kompas, Rabu 14 Mei 2014).

**Tabel 1.1**  
**Data Perempuan di Parlemen/DPR RI Tahun 1955-2009**

<b>Periode</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-laki</b>
1955-1956	17 (6,3%)	272 (93,7%)
Konstituante 1956-1959	25 (5,1%)	488 (94,9%)
1971-1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)
1977-1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)
1982-1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
1987-1992	65 (13%)	500 (87%)
1992-1997	62 (12,5%)	500 (87,5%)
1997-1999	54 (10,8%)	500 (89,2%)
1999-2004	46 (9%)	500 (91%)
2004-2009	61 (11,10%)	489 (88,9%)
2009-2014	101 (18,00%)	459 (82,00%)

*Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI. (dalam Jurnal Perempuan)*

Data perkembangan keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.1. menggambarkan bahwa rata-rata persentase jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Indonesia masih sangat rendah yaitu sekitar 9,83%.

Rendahnya keterlibatan perempuan di bidang politik disebabkan oleh berbagai kendala seperti kendala sistem politik, sosial budaya, sosial ekonomi dan

psikologis. Dari berbagai pengalaman pahit yang terjadi di Indonesia selama inilah maka perempuan dan seluruh elemen masyarakat, termasuk di dalamnya LSM-LSM yang menggeluti persoalan perempuan dan organisasi masyarakat lainnya serta bekerja sama dengan anggota parlemen yang peka terhadap nasib perempuan untuk memperjuangkan posisi perempuan dan diakui hak-haknya dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam bidang politik, agar perempuan dapat mewakili lembaga legislatif. Hal itu kemudian melahirkan ide untuk melakukan terobosan institusional (terobosan kelembagaan), oleh aktivis perempuan yang duduk di lingkungan legislatif untuk membuat peraturan perundang-undangan yang memperhatikan realitas politik perempuan Indonesia.<sup>6</sup>

Disamping itu, dengan melihat beberapa negara lain di dunia dalam proses pemilihan kandidat untuk anggota parlemen, yang mana masing-masing partai politik telah memberikan kuota kepada kandidat perempuan, seperti di Argentina memberikan kuota sebesar 30%, Brazil 20% dan India 33%. Dengan belajar dari pengalaman perempuan Indonesia selama ini, serta melihat upaya strategis yang telah ditempuh oleh negara lain, maka pemerintah Indonesia melalui kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan telah mengusulkan kuota sebesar 30% sebagai langkah sementara peningkatan perempuan dalam pengambilan kebijakan, dan selama sistem politik di Indonesia masih bersifat patriarki maka langkah ini adalah langkah yang strategis.<sup>7</sup> Hal tersebut banyak dilakukan oleh

---

<sup>6</sup> Perempuan Politik di Parlemen: *Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan* 1991-2001, 2001.hlm. 26

<sup>7</sup> Perempuan Politik di Parlemen: *Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan* 1991-2001, 2001.hlm. 8

negara di dunia dengan tujuan supaya perempuan lebih dapat terlibat di dalam proses pengambilan keputusan serta pengambilan kebijakan di dalam parlemen, sehingga kepentingan perempuan akan dapat terakomodir secara jelas dan dihargai hak-haknya.

Keterlibatan perempuan 30% dalam keterwakilan tersebut dimulai dari partai politik terlebih dahulu dimana setiap partai melibatkan perempuan minimal 30% dalam kepengurusannya. Pada dasarnya, menjadi pengurus sebuah partai merupakan proses awal sebelum terjun dalam dunia politik yang sebenarnya. Ketika perempuan terlibat dalam kepengurusan partai politik maka secara tidak langsung mendapatkan pendidikan politik sehingga ketika mencalonkan sebagai anggota legislatif, perempuan-perempuan tersebut dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui pengalaman yang sudah didapatkan ketika menjadi pengurus partai politik. Fakta yang terjadi pada partai di tingkat nasional adalah perempuan-perempuan yang maju dalam pemilu legislatif justru orang-orang yang sebelumnya belum pernah terlibat dalam kepengurusan partai politik, sehingga banyak dari perempuan tersebut tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif. Terlebih apabila perempuan yang dicalonkan oleh partai sebelumnya berprofesi sebagai publik figur, maka bukan tidak mungkin tujuan partai tersebut hanya ingin memperoleh suara melalui popularitas tanpa memperhatikan apakah calon tersebut bisa bekerja dan mengabdikan kepada partainya. Upaya untuk menyetarakan gender sudah diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2012 pasal 55 yaitu “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.”



Ketentuan angka tiga puluh diambil dengan berbagai pertimbangan, diantaranya adalah:

- 1) Pemberian kuota ini merupakan terobosan baru yang masih sarat dengan berbagai perdebatan dan pro kontra, sehingga angka tiga puluh merupakan angka yang dianggap cukup mewakili perempuan apabila hal ini dapat benar-benar terealisasi.
- 2) Mengingat kondisi perempuan Indonesia secara umum yang masih ragu untuk terjun ke dunia politik praktis.
- 3) Kuota 30% ini merupakan solusi alternatif sementara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif.

Perlu diingat bahwa kuota 30% adalah kuota minimal bukan kuota maksimal. Sehingga dapat memberikan banyak kesempatan untuk perempuan Indonesia dalam berpartisipasi di dunia politik dan menyuarakan hak-haknya. Proses pengesahan undang-undang mengenai kuota 30% untuk perempuan di dalam lembaga legislatif atau parlemen tidaklah mudah, melewati proses perjuangan yang keras dan perdebatan panjang antara pro dan kontra. Namun dengan semangat dan kegigihan perempuan Indonesia sampailah pada proses pembentukan dan pengesahan undang-undang tersebut. Dengan demikian kenyataan disahkannya kuota 30% bagi perempuan dalam pencalonan legislatif dapat terwujud, yakni dengan diundangkannya UU Pemilu No. 12 tahun 2003 dalam pasal 65 (1) yang berisi: “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”.

Menjelang pemilihan umum pada tahun 2009, muncul kebijakan yang sangat positif dalam bentuk *affirmative action* mengenai kuota perempuan di dalam parlemen sebagai aktor politik dan pemerintahan. Salah satu kebijakannya adalah adanya kuota untuk bakal calon wakil rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di dalamnya berisi kebijakan inti mengenai isu representasi politik perempuan yang di dalamnya ditegaskan mengenai kuota perempuan di parlemen. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, perempuan diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam dunia politik dan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pasal 53 mengamanatkan agar partai politik memuat keterwakilan paling sedikit 30% perempuan dalam daftar calon legislatifnya. Pasal ini diperkuat oleh pasal 55 ayat 2 yang menyatakan bahwa di dalam setiap tiga nama kandidat, setidaknya terdapat sekurang-kurangnya satu nama kandidat perempuan. Kebijakan kuota perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon legislatif juga diperkuat dengan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Sistem kuota merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan guna meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam politik dan sebagai sarana untuk menjamin agar kepentingan-kepentingan perempuan dapat terwakili. Karena banyak isu-isu perempuan yang tidak dapat tersuarakan seperti isu

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemerkosaan, kodrat perempuan, peran ganda perempuan, hak-hak perempuan bekerja, hak-hak reproduksi, dan lain-lain. Biasanya isu-isu tersebut hanya ditanggapi secara normatif, tidak dibahas lebih dalam. Keterwakilan perempuan di parlemen juga sangat penting dalam pengambilan keputusan publik karena akan berdampak pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga Negara dan publik. Selain itu juga akan membawa perempuan pada cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena perempuan akan lebih berpikir *holistic* dan berresponsif gender. Banyak pro dan kontra yang mewarnai kebijakan ini, di satu sisi kebijakan ini dibuat agar para perempuan terwakili suaranya dan disisi lainnya agar tidak ada bias gender di dalam parlemen atau pemerintahan. Menurut Anna Balletbo seorang anggota parlemen dari Spanyol mengatakan bahwa kuota bagi perempuan merupakan pedang bermata dua. Di satu pihak, kuota membuat laki-laki berfikir tentang keterlibatan perempuan dalam pembuatan keputusan, karenanya laki-laki menciptakan ruang untuk perempuan. Di pihak lain, karena laki-laki yang membuka ruang ini, maka mereka akan mencari perempuan yang dapat diatur, perempuan yang lebih menerima hegemoni laki-laki.<sup>8</sup>

Munculnya kebijakan ini tentu saja ada alasan yang mendasar, keterwakilan perempuan di dalam parlemen dengan kuota 30% karena beberapa hal yaitu, tanggung jawab dan kepekaan atas isu-isu kebijakan publik terutama yang

---

<sup>8</sup> *Women in Parliament*, 2002. Hlm.116

terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan *multitasking*, dan manajemen pengelolaan waktu. Apabila parlemen masih hanya dipenuhi oleh kaum pria maka isu-isu, masalah-masalah dan semua hal yang berkaitan dengan perempuan tidak bisa diselesaikan dan dijalankan dengan baik dan maksimal. Selain hal-hal tersebut dapat kita lihat bahwa peran perempuan sudah banyak ditemui di bidang sosial dan kemasyarakatan. Misalnya sebagai pemimpin di dalam kelompok-kelompok sosial atau komunitas dan kegiatan kemasyarakatan lainnya, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok-kelompok pengajian. Lahirnya undang-undang yang berisi mengenai kuota tersebut merupakan berita baik bagi para kaum perempuan. Dengan adanya undang-undang tersebut secara langsung mengakui adanya kebutuhan untuk melibatkan perempuan dalam partai politik sebagai upaya agar perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Diikutsertakan dalam menjalankan segala hal yang berbau dengan partai politik, kebijakan dan pemerintahan.

Apabila dicermati secara mendalam, undang-undang mengenai partai politik khususnya kebijakan kuota perempuan ini sangat lemah. Terlihat bahwa tidak adanya penekanan tentang keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan partai. Tidak ada jaminan bahwa kuota 30% perempuan di dalam parlemen atau keanggotaan partai politik akan secara otomatis mengubah pandangan partai politik berpihak pada perempuan. Kurang tegasnya aturan dalam undang-undang tersebut juga menyebabkan bahwa kuota sebesar 30% menjadi angka yang

meragukan untuk dapat terwujud, karena dalam kenyataannya banyak partai politik yang tidak menerapkan kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut hanya sebagai formalitas saja tidak diimplementasikan secara benar dan tepat.

Pesta demokrasi terjadi pada tahun 2014, dimana hajat 5 tahunan tersebut kembali digelar untuk memilih DPR, DPD, DPRD. Ketika bicara soal pemilu, baik itu pemilu eksekutif maupun pemilu legislatif, maka topik pembicaraannya bukan sekedar bagaimana sirkulasi kekuasaan itu dilakukan, bagaimana cara memilih dan mendelegasikan kedaulatan, akan tetapi yang tidak kalah menarik dari penyelenggaraan pemilu adalah bagaimana seseorang bisa mendapatkan kekuasaan dan menang dalam pemilu tersebut. Kampanye adalah bagian inheren dari kegiatan pemilu. Kampanye merupakan serangkaian agenda partai atau perorangan yang berkaitan dengan rekrutmen masa sebagai basis politik. Rekrutmen tersebut dilakukan dengan cara pengumpulan masa, parade, orasi, dengan pemaparan program kerja. Hal ini dilakukan guna mempengaruhi opini publik dengan pemasangan atribut partai (misalnya umbul-umbul, poster, spanduk), dan pengiklanan partai melalui media cetak ataupun elektronik. Hal ini dimaksudkan untuk sosialisasi program kerja dalam mempengaruhi opini publik.<sup>9</sup>

Strategi dalam menghadapi pemilihan legislatif daerah merupakan perencanaan yang cermat yang disusun dan dilaksanakan oleh tim kampanye yang memiliki tujuan mencapai kemenangan atas sasaran yang ditentukan dalam pileg. Sasaran merupakan apa yang ingin dicapai oleh kandidat dan tim kampanye dalam hal ini adalah target dukungan pemilihan yang diwujudkan dalam pemberian suara

---

<sup>9</sup> Firmanzah, *Marketing Politik*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010),hlm.217

kepada kandidat tersebut.<sup>10</sup> Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebagai aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Dalam kamus politik strategi diartikan sebagai ilmu dan seni yang menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan terutama dalam hal perang dan damai.<sup>11</sup>

Pada tahun ini, persaingan antar partai politik sangat terasa untuk bisa menjadi pemenang dalam pesta demokrasi tersebut. Selain itu, adanya koalisi beberapa partai politik juga menambah sengitnya pertarungan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Namun, persaingan partai politik di tingkat pusat yang berkoalisi dalam mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden tidak berlaku di lingkungan daerah, dimana di tingkat daerah partai politik yang bersebrangan dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut justru berkoalisi di tingkat daerah. Selain persaingan dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik juga berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan jumlah kursi yang lebih banyak dari partai lain. Partai-partai tersebut bersaing untuk bisa mendapatkan suara di masyarakat dengan mencalonkan beberapa publik figur yang dianggap mampu meningkatkan elektabilitas partai politik. Sebelum pelaksanaan pemilu legislatif, partai politik berhak untuk melakukan seleksi bakal calon legislatif dan berusaha mengumpulkan masa pendukung sebanyak banyaknya. Kemudian melakukan proses pendekatan dan merencanakan strategi pemasaran politiknya. Dalam hal ini seorang calon legislatif juga tidak bisa mengandalkan secara

---

<sup>10</sup>Salatun Dalula Sayuti: *Komunikasi Pemasaran Politik*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm 109.

<sup>11</sup> BN Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003) hlm 349.

maksimal terhadap partai politik, melainkan juga harus mempunyai strategi pemasaran politik nya sendiri. Sehingga nantinya calon legislatif mampu bersaing dengan lawan politiknya baik itu secara internal maupun eksternal partai.

Dalam pemilihan legislatif tahun 2014 di Jawa Tengah, terdapat 12 partai politik yang turut serta menjadi peserta untuk dapat memperoleh suara di masyarakat. Dimana 12 partai politik tersebut bersaing di 10 daerah pemilihan yang ada di provinsi Jawa Tengah. Rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara menetapkan bahwa, PDIP berada di urutan pertama dengan perolehan 4.295.598 suara disusul oleh GOLKAR dengan 2.497.282 suara dan posisi ketiga PKB dengan 2.305.444 suara.<sup>12</sup> Dengan demikian, PDIP merupakan salah satu partai dengan pendukung terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten / kota di Jawa Tengah juga menjadi hal yang menarik dalam Pemilu ini. Salah satunya adalah keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Temanggung, yang tingkat keterwakilan perempuan dalam DPRD tinggi.

Pemilu Kabupaten Temanggung pada tahun 2014, terdapat 9 partai politik yang bersaing untuk bisa memperebutkan suara. Selain partai politik, calon anggota legislatif juga berlomba-lomba untuk bisa menjadi anggota legislatif terpilih. Berikut daftar anggota lembaga legislatif Kabupaten Temanggung tahun 2014.

---

<sup>12</sup><http://kpu-jatengprov.go.id/> diakses pada 20 Juni 2017 Pukul 20:00 WIB

**Tabel 1.2**  
**Daftar Anggota Legislatif**  
**Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019**

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1	M. Subchan Bazari	Ketua DPRD Ketua Badan Musyawarah Ketua Badan Anggaran	PDI P
2	Mattoha, S.E.	Wakil Ketua DPRD Wakil Ketua Badan Musyawarah Wakil Ketua Badan Anggaran	P K B
3	Drs. Tunggul Purnomo	Wakil Ketua DPRD Wakil Ketua Badan Musyawarah Wakil Ketua Badan Anggaran Ketua Badan Pembentukan Perda	Partai Golkar Sejahtera
4	Akhmad Masfudin	Wakil Ketua DPRD Ketua Badan Musyawarah Ketua Badan Anggaran	PAN – PD
5	Drs. Muh. Sayid	Ketua Fraksi Ketua Komisi A DPRD Anggota Badan Anggaran Anggota Badan Pembentukan Perda	NASDEM
6	Umi Fadhilah	Sekretaris Fraksi Sekretaris Komisi “C” DPRD Anggota Badan Anggaran	NASDEM
7	Drs. Istachori	Wakil Ketua Fraksi Sekretaris Komisi “B” DPRD Anggota Badan Anggaran	NASDEM
8	Siti Kustijah, S.Ag	Anggota Fraksi Anggota Komisi “D” DPRD Anggota Badan Musyawarah	NASDEM
9	Dra. Hj. Masfufah	Wakil Ketua Fraksi Anggota Komisi “A” DPRD Anggota Badan Pembentukan Perda	P K B
10	Tri Eko Wasti	Anggota Fraksi Anggota Komisi “C” DPRD Anggota Badan Musyawarah	P K B



No	Nama	Jabatan	Fraksi
11	Mahzum, S.Hi	Ketua Fraksi Anggota Komisi B DPRD Anggota Badan Anggaran	P K B
12	Muhamad Amin, S.Ag	Anggota Fraksi Anggota Komisi "D" DPRD Anggota Badan Anggaran	P K B
13	Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si.	Sekretari Fraksi Anggota Komisi D Anggota Badan Musyawarah	P K B
14	H. Iman Bintara, S.T.	Wakil Ketua Fraksi Anggota Komisi B Anggota Badan Anggaran	Partai Golkar Sejahtera
15	Permatri Dany Wismasitasari, S.Hi	Anggota Fraksi Anggota Komisi "C" DPRD Anggota Badan Musyawarah	Partai Golkar Sejahtera
16	Elynawati, S.Pd	Anggota Fraksi Sekretaris Komisi "D" DPRD	Partai Golkar Sejahtera
17	Ika Rizkiwati	Anggota Fraksi Anggota Komisi "C" DPRD Anggota Badan Musyawarah	PDI P
18	H. Agung Priyo Widodo	Anggota Fraksi Anggota Komisi "B" DPRD Anggota Badan Pembentukan Perda	PDI P
19	E. Intan Kurniasari, S.E, A.Kt	Sekretaris Fraksi Anggota Komisi "C" DPRD Anggota Badan Pembentukan Perda	PDI P
20	Dra. Titik Winarti	Ketua Fraksi Anggota Komisi "D" DPRD Anggota Badan Musyawarah	PDI P
21	Yunianto, Sp	Anggota Fraksi Anggota Komisi "B" Anggota Badan Anggaran	PDI P
22	Gunawan Adi Purnomo	Wakil Ketua Fraksi Anggota Komisi "A" DPRD Anggota Badan Anggaran	PDI P
23	Dwi Lindawati, Sh, M.Hum	Anggota Fraksi Anggota Komisi "A" DPRD Anggota Badan Pembentukan Perda	Partai Golkar Sejahtera

No	Nama	Jabatan	Fraksi
24	H. Djarjono, B.A.	Anggota Fraksi Anggota Komisi "D" DPRD Anggota Badan Kehormatan Anggota Badan Musyawarah	Partai Golkar Sejahtera
25	I S H A D I	Ketua Fraksi Wakil Ketua Komisi "B" DPRD Anggota Badan Musyawarah Anggota Badan Anggaran	Partai Golkar Sejahtera
26	Slamet, S.E	Sekretaris Fraksi Ketua Komisi "C" DPRD Anggota Badan Anggaran	Partai Golkar Sejahtera
27	H. Ibnu Malik	Wakil Ketua Fraksi Anggota Komisi "C" DPRD Anggota Badan Musyawarah Anggota Badan Kehormatan	GERINDRA
28	Nur Bawono	Anggota Fraksi Anggota Komisi "B" Anggota Badan Musyawarah	GERINDRA
29	Indah Cahyani, S.Sos.	Sekretaris Fraksi Anggota Komisi D Anggota Badan Anggaran	GERINDRA
30	Daniel Indra Hartoko, S.E.	Ketua Fraksi Anggota Komisi "A" DPRD Anggota Badan Anggaran Anggota Badan Pembentukan Perda	GERINDRA
31	Muh. Taryono	Wakil Ketua Fraksi Sekretaris Komisi "B" DPRD Anggota Badan Anggaran	PAN – PD
32	Ahmad Heri Pramono, Sp	Anggota Fraksi Anggota Komisi "A" DPRD Anggota Badan Musyawarah	PAN – PD
33	Arif Rosidi	Sekretaris Fraksi Anggota Komisi "C" DPRD Anggota Badan Pembentukan Perda	PAN – PD
34	Moh Burhanudin	Anggota Fraksi Wakil Ketua Komisi "A" DPRD Anggota Badan Musyawarah	PAN – PD

No	Nama	Jabatan	Fraksi
35	Farouk Setiawan, St	- Anggota Fraksi PAN-PD Anggota Komisi "B" DPRD Anggota Badan Pembentukan Perda	PAN – PD
36	Badrun Mustofa, S.Pd	Ketua Fraksi Ketua Komisi "D" DPRD Anggota Badan Anggaran	PAN – PD
37	Siti Su'aibah, S.Sos	Anggota Komisi "A" DPRD Wakil Ketua Badan Kehormatan Anggota Badan Musyawarah	P P P
38	Mudiyanto	Wakil Ketua Fraksi Wakil Ketua Komisi "D" DPRD Anggota Badan Anggaran	P P P
39	Guruh Saputro, Se	Sekretaris Fraksi Anggota Komisi "C" DPRD Anggota Badan Pembentukan Perda	P P P
40	Anang Hudallah	Anggota Fraksi Anggota Komisi "C" DPRD	P P P
41	Slamet Eko Wantoro	Ketua Fraksi Ketua Komisi "B" DPRD Anggota Badan Musyawarah	P P P
42	Siti Margolestari, Ba	Anggota Fraksi Sekretaris Komisi "A" Anggota Badan Musyawarah	HANURA
43	Bambang Romanto, St	Sekretaris Fraksi Wakil Ketua Komisi "C" DPRD Anggota Badan Anggaran	HANURA
44	Agus Hariyanto	Wakil Ketua Fraksi Anggota Komisi "B" DPRD Anggota Badan Musyawarah Anggota Badan Pembentukan Perda	HANURA
45	Isnarwandi, S.Ag	Ketua Fraksi Anggota Komisi "D" DPRD Ketua Badan Kehormatan Anggota Badan Anggaran	HANURA

Sumber: KPU Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat ada 45 orang yang terpilih sebagai anggota legislatif di Kabupaten Temanggung untuk periode 2014-2019, dan terdapat 14 perempuan dalam tubuh lembaga legislatif kabupaten Temanggung tersebut. Jumlah tersebut telah memenuhi kuota 30% jumlah yang tersedia untuk anggota dewan perempuan. Hal tersebut diharapkan dapat berdampak baik pada proses pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan. Perolehan kursi anggota legislatif Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 dari masing-masing partai cenderung tidak tetap. Dimana terdapat partai politik yang mengalami peningkatan dalam perolehan kursi serta ada juga yang mengalami penurunan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang merupakan partai dengan basis nasionalisnya di Temanggung mampu memimpin dengan perolehan kursi terbanyak selama dua periode. Tidak hanya peningkatan dalam jumlah kursi yang diperoleh oleh PDIP, peningkatan tersebut juga terjadi pada jumlah anggota legislatif perempuan terpilih. Dimana pada Pemilu 2009 anggota legislatif perempuan dari fraksi PDIP berjumlah 2 orang, sedangkan pada Pemilu 2014 anggota legislatif perempuan dari fraksi PDIP berjumlah 3 orang. Pada Pemilu tahun 2014 di Kabupaten Temanggung, PDIP memperoleh 84.763 suara.

Melihat basis pendukung yang dimiliki partai tersebut tentunya calon tersebut mempunyai kualitas untuk bisa menjadi peserta Pemilu. Pada hal ini strategi juga akan mempengaruhi pada perolehan suara calon. PDI-P pada pemilu 2009 hanya menempatkan anggota legislatif perempuan 2 orang, namun mengalami peningkatan pada Pemilu selanjutnya. Tentu pada kenaikan anggota dewan perempuan yang terpilih dari Partai PDI-P telah melakukan upaya upaya dalam menaikkan elektabilitasnya. Karena persaingan di tahun berikutnya lebih ketat dan kompetitif. Selain kualitas, peran partai serta strategi politik sangat dibutuhkan dalam perebutan kursi pada Pemilu di Kabupaten Temanggung. Terlebih, PDIP merupakan partai yang mempunyai masa pendukung besar di Kabupaten Temanggung. Masing-masing calon tentunya mempunyai strategi yang digunakan untuk bisa meningkatkan elektabilitasnya dan

dukungan di masyarakat sehingga terpilih. Banyak faktor-faktor dan strategi yang digunakan oleh masing-masing calon sehingga bisa terpilih mulai dari partai politik, figur, keluarga, maupun tim sukses masing-masing calon sesuai dengan kebutuhan masing-masing calon.

Penelitian ini akan menjawab bagaimana keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Temanggung pada pemilu 2014-2019 pada pemberlakuan kuota 30% dalam pencalonan anggota legislatif sebagaimana yang sudah diamanatkan UU No. 10 Tahun 2008 dan bagaimana strategi calon anggota legislatif perempuan PDIP dalam keterpilihannya pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Temanggung. Penulis memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan diteliti. Yang mana partai tersebut merupakan partai pemenang pemilu legislatif di Kabupaten Temanggung periode 2014 – 2019.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi keterpilihan calon anggota legislatif perempuan PDI-P dalam pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Temanggung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi keterpilihan calon anggota legislatif perempuan PDIP pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Temanggung.

## **1.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Berikut ini adalah manfaat yang diharapkan dalam hasil penelitian:

### 1) Bagi Peneliti

Menambah wawasan mengenai keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Temanggung , khususnya pada PDI-Perjuangan.

### 2) Bagi Aktivistis/Pemerhati Perempuan

Sebagai data dan informasi untuk tetap memperjuangkan hak-hak perempuan.

### 3) Bagi Partai Politik

Sebagai bahan rujukan dalam melakukan pendidikan politik pada perempuan, sehingga para perempuan dapat memiliki nilai yang lebih di dalam pemerintahan dan dapat bersaing dengan laki-laki.

### 4) Bagi Pengambil Kebijakan

Memudahkan dalam merancang dan merumuskan strategi untuk memberdayakan dan mencerdaskan perempuan dalam bidang politik.

### 5) Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan masyarakat agar tahu tentang keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Temanggung, khususnya pada partai pemenang pemilihan umum 2014-2019.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan peninjauan kembali pustaka-pustaka penelitian sebelumnya yang terkait. Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti menggunakan dua penelitian yang sejenis. Pertama, pada penelitian sebelumnya yang berjudul Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Memobilisasi Pemilih di Kota Semarang Tahun 2014 oleh Ridho Satrio Hutomo dari Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2015. Hasil penelitiannya adalah dimana PDIP pada pemilu 2014 ingin menang mutlak dengan meraih 30 kursi di DPRD Kota Semarang. Strategi komunikasi politik yang dilakukan PDIP diantaranya ialah pendekatan sosial, komunikasi tatap wajah atau *face to face*, komunikasi dengan alat peraga, dan *roadshow* caleg.

Komunikasi politik tatap wajah atau *face to face* dijadikan sebagai senjata pamungkas dikarenakan pemahaman mereka bahkan dengan cara tersebut dapat mempererat hubungan

partai dengan para caleg serta masyarakat Kota Semarang secara jasmani dan rohani. Kampanye masif melalui media dan pengenalan figur melalui alat peraga merupakan sebuah strategi sekunder bagi PDIP, bahkan meminimalisir kampanye menggunakan media ini atas dasar besarnya biaya yang harus dikeluarkan partai dan caleg apabila menggunakan strategi ini. Namun demikian, PDIP tetap menggunakan strategi standar seperti pemasangan alat peraga kampanye disetiap sudut kota untuk mengenalkan profil para caleg kepada masyarakat Kota Semarang. Dalam melaksanakan komunikasi politik tersebut, PDIP mempunyai aktor kunci diantaranya yaitu Ketua DPC PDIP Kota Semarang, Fungsiaris dan Kader Partai, serta Caleg dan Tim Sukses. Aktor-aktor tersebut memainkan peran yang sangat penting sehingga PDIP mampu meraih 15 kursi di DPRD Kota Semarang. Mereka berhasil membangun 3 (tiga) kemampuan karakter dalam penyampaian pesan yaitu *good sense, good moral character, dan good will*.

Dalam pelaksanaan komunikasi politik tersebut tentunya PDIP menghadapi permasalahan baik itu internal maupun eksternal. Permasalahan internal diantaranya terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kampanye PDIP. Sedangkan permasalahan eksternal diantaranya apatisme masyarakat terhadap permasalahan politik. Namun demikian, PDIP mampu mengatasi permasalahan tersebut melalui gotong royong internal partai.

Metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan kualitatif dengan penekanan pada deskriptif dan analisis. Dari penelitian tersebut, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada fokus permasalahan. Penelitian sebelumnya meneliti tentang strategi komunikasi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memobilisasi pemilih di Kota Semarang Tahun 2014, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu strategi peningkatan elektabilitas calon anggota legislatif perempuan dari fraksi PDIP pada Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Temanggung.

Kedua, penelitian berjudul Strategi Partai Demokrat dalam Pemenangan Pemilu Legislatif

2009 di Kota Semarang oleh Sutanto dari Universitas Negeri Semarang Tahun 2011. Hasil penelitiannya adalah Partai Demokrat dalam pemenangan pemilu legislatif 2009 di Kota Semarang menggunakan dua strategi. *Pertama*, strategi komunikasi terdiri dari; (a) Jaringan kekuasaan tingkat lokal yaitu menghimpun kekuasaan mayoritas elite lokal di Kota Semarang untuk kemudian mengikatnya (baik secara sukarela ataupun melalui tekanan struktural), dengan memanfaatkan pengaruh elite secara luas, baik di struktural birokrasi, pengusaha maupun elite di lingkungan pendukung (*supporter*) sepakbola; (b) Sosialisasi dengan melakukan pencitraan (figur caleg) dan penguatan jati diri (*karakter partai*) terhadap masyarakat serta menyampaikan visi dan misi serta program Partai Demokrat; (c) Menghadiri atau mengadakan *event* dilingkungan masyarakat dengan menyampaikan program, kampanye atau sosialisai ke masyarakat (d) melakukan kampanye tertutup atau kampanye langsung dan kampanye terbuka atau kampanye tidak langsung; (e) *Money politic* dilakukan melalui kampanye terbuka atau tertutup. *Kedua*, yaitu pencitraan meliputi; (a) Figur pemimpin yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden, kepiawaiannya membangun citra (sebagai pemimpin yang santun, jujur serta pemurah (*benevolent*), yang menghegemoni masyarakat; (b) Citra Partai Demokrat dikenal sebagai partai yang besar, kuat, baik, membela rakyat, dan memiliki komitmen terhadap nasib rakyat kecil, peka terhadap persoalan yang di hadapi masyarakat. Dalam pelaksanaan strategi tersebut tentunya terdapat kendala-kendala yang dihadapi Partai Demokrat diantaranya yaitu ekonomi (keuangan), yakni dana atau biaya yang digunakan untuk kampanye, sosialisasi, kegiatan yang terselenggara (*event*) dan *money politic* ditanggung oleh caleg yang mencalonkan diri, partai hanya sebagai kendaraan politik.

Metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan kualitatif dimana data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian tersebut, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada fokus permasalahan. Penelitian sebelumnya meneliti tentang strategi dari Partai Demokrat dalam pemenangan



Pemilu Legislatif 2009 di Kota Semarang, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu strategi peningkatan elektabilitas calon anggota legislatif perempuan dari fraksi PDIP pada Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Temanggung.

## 1.5.2 Kerangka Teori

### 1.5.2.1 Strategi Politik

Strategi merupakan perencanaan dalam mensukseskan tujuan arah dalam segala aktifitas. Baik dalam mensukseskan peperangan, kompetisi, maupun yang lainnya. Kemudian seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang manajemen, kata strategi yang biasa di gunakan organisasi profit dan non profit, sering digabungkan dengan perencanaan strategi dimaknai rancangan yang bersifat sistemik dilingkungan sebuah organisasi. Sedangkan manajemen strategi mempunyai definisi yang berbeda. Melalui bukunya Haddari Nawawi menyebutkan strategi adalah :<sup>13</sup>

*“Proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya”<sup>14</sup>.*

Dilihat dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan secara rinci, bahwa: Manajemen strategi adalah proses pengambilan keputusan, kedua, keputusan yang diambil merupakan keputusan yang menyeluruh dan mendasar. Ketiga, pembuatan keputusan dilakukan oleh pucuk pimpinan sebagai penanggung jawab utama dalam keberhasilan dan kegagalan dalam sebuah organisasi. Keempat, pengimplementasian keputusan tersebut sebagai strategi organisasi untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh seluruh jajaran organisasi. Kelima, keputusan tersebut diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam bentuk kegiatan/pelaksanaan pekerjaan yang terarah.

---

<sup>13</sup> Hadari Nawawi, Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan ilustrasi di Bidang Pendidikan. (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2005) hal. 148

<sup>14</sup> Hadari Nawawi, Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan. (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2005) hal. 148

Kemudian pengertian strategi secara keseluruhan menurut Hadari Nawwawi adalah :<sup>15</sup>

*“Perencanaan berskala besar (disebut perencanaan strategi) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut visi) dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak, agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut misi) dalam usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan Operasional) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategi) dan berbagai sasaran (tujuan operasional) organisasi.”*

Sedangkan menurut Michael Allison dan Jude Kaye, Strategi adalah<sup>16</sup> :

*“Proses sistemik yang disepakati organisasi dan membangun keterlibatan diantara stakeholder utama tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi.”*

Pada dasarnya strategi politik adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih partai politik atau kontestan tertentu. Makna inilah yang menjadi *output* penting strategi politik yang menentukan pihak-pihak mana yang akan dicoblos para pemilih .<sup>17</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa strategi politik adalah sebuah rencana yang sistematis yang diimplementasikan guna mencapai kemenangan dalam bidang politik. Strategi politik yang digunakan oleh partai politik merupakan salah satu faktor penentu kemenangan partai politik dalam momen pemilu, karena strategi politik yang baik nantinya mampu mengarahkan pemilih untuk memilih partai politik maupun kontestan dari partai politik tertentu.

### 1.5.2.2 Elektabilitas

Elektabilitas berasal dari kata *electability* (bahasa Inggris), diturunkan dari kata *elect* (memilih). Bentuk-bentuk turunan dari kata *elect* antara lain *election*, *electable*, *elected*, *electiveness*, *electability*, dan sebagainya. Elektabilitas dalam pemaknaan politik adalah tingkat keterpilihan suatu partai, atau kandidat yang terkait dengan proses pemilihan umum. Istilah

---

<sup>15</sup> Ibid. Hal 149

<sup>16</sup> Michael Allison, dan Jude Keye, Perencanaan Strategis bagi Organisasi Nirlaba. (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia) hal. 1

<sup>17</sup> Adman Nursal, Political Marketing: Strategi memenangkan pemilu, sebuah pendekatan baru kampanye pemilihan DPR, DPD, Presiden, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 23.

popularitas dan elektabilitas dalam masyarakat memang sering disamaartikan, padahal keduanya mempunyai makna dan konotasi yang berbeda meskipun keduanya mempunyai kedekatan dan korelasi yang besar. Popularitas lebih banyak berhubungan dengan dikenalnya seseorang, baik dalam arti positif ataupun negatif. Sementara elektabilitas berarti kesediaan orang memilihnya untuk jabatan tertentu. Artinya, elektabilitas berkaitan dengan jenis jabatan yang ingin diraih. Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan dan bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang Pemilu. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik, dimana elektabilitas partai yang tinggi artinya partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas berusaha memenuhi kriteria keterpilihan.

Kalau mencermati prosedur maupun proses pemilihan umum legislatif secara langsung, calon anggota legislatif berkemungkinan memenangkan pilkada secara langsung manakala memiliki tiga modal utama. Ketiga modal itu adalah modal politik (*political capital*), modal sosial (*social capital*) dan modal ekonomi (*economical capital*).<sup>18</sup>

1. Modal Politik berarti adanya dukungan politik, baik dari rakyat maupun dari kekuatan-kekuatan politik yang dipandang sebagai representasi dari rakyat. Modal ini menjadi sentral bagi semua calon, baik dalam tahap pencalonan maupun dalam tahap pemilihan.<sup>19</sup> Biasanya setiap calon anggota legislatif, akan membentuk tim sukses mulai dari tingkatan paling tinggi hingga tingkatan paling rendah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa). Bahkan biasanya yang “dipasang” sebagai saksi pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) adalah para tim sukses itu sendiri. Peranan partai politik maupun tim sukses sangat besar karena akan menjadi “mesin” dalam menggerakkan upaya pencarian dukungan pemilih.

---

<sup>18</sup> Kacung Marijan, *Demokratisasi Di Daerah (Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung)*, 2006. Surabaya : Eureka dan PusDeHAM. Hal. 85

<sup>19</sup> Ibid

2. Modal Sosial adalah berkaitan dengan bangunan relasi dan kepercayaan (*trust*) yang dimiliki oleh calon anggota legislatif dengan masyarakat yang memilihnya. Termasuk didalamnya adalah sejauh mana calon anggota legislatif itu mampu meyakinkan para pemilih bahwa mereka itu memiliki kompetensi untuk menjadi wakilnya di parlemen dan memiliki integritas yang baik. Suatu kepercayaan tidak akan tumbuh begitu saja tanpa didahului oleh adanya pengenalan. Tetapi, keterkenalan atau popularitas saja kurang bermakna tanpa ditindaklanjuti oleh adanya integritas.<sup>20</sup> Melalui modal sosial yang dimiliki, para kandidat tidak hanya dikenal oleh para pemilih. Lebih dari itu, melalui pengenalan itu, lebih-lebih pengenalan yang secara fisik dan sosial berjarak dekat, para pemilih bisa melakukan penilaian apakah calon anggota legislatif yang ada itu benar-benar layak untuk dipilih atau tidak. Seseorang dikatakan memiliki modal sosial, berarti calon itu tidak hanya dikenal oleh masyarakat melainkan juga diberi kepercayaan.

3. Modal Ekonomi, modal ekonomi tidak hanya dipakai untuk membiayai kampanye tapi juga relasi dengan para (calon) pendukungnya, termasuk didalamnya adalah modal untuk memobilisasi dukungan pada saat menjelang dan berlangsungnya masa kampanye. Tidak jarang, modal itu juga ada yang secara langsung dipakai untuk mempengaruhi pemilih. Misalnya saja, banyak ditemui kasus ada calon yang membagi- bagikan uang atau barang kepada para pemilih. Biasanya pemberian barang atau uang itu tidak diberikan oleh pasangan calon secara langsung, melainkan oleh tim sukses calon anggota legislatif. Sangat sulit membedakan modal ekonomi atau politik uang, karena pembuktian politik uang sangat sulit walaupun sering terjadi.<sup>21</sup>

Ketiga modal tersebut memang bisa berdiri sendiri-sendiri tanpa adanya keterkaitan

---

<sup>20</sup> Kacung Marijan, *Demokratisasi Di Daerah (Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung)*, 2006. Surabaya : Eureka dan PusDeHAM. Hal. 91

<sup>21</sup> Kacung Marijan, *Demokratisasi Di Daerah (Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung)*, 2006. Surabaya : Eureka dan PusDeHAM. Hal. 94-95

antara satu dengan yang lain. Tetapi di antara ketiganya acap kali berkait satu dengan yang lain. Artinya, calon anggota legislatif itu memiliki peluang besar terpilih manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modal. Argumen yang terbangun adalah bahwa semakin besar calon anggota legislatif yang mampu mengakumulasi tiga modal itu, maka semakin berpeluang pula calon anggota legislatif tersebut terpilih sebagai anggota legislatif kabupaten.

### **1.5.2.3 Konsep Citra Perempuan dalam Politik**

Faktor dasar yang dianggap memengaruhi kemunculan pemimpin perempuan di dunia politik adalah budaya patriarki, pertalian keluarga, martydom, kelas sosial, gaya hidup, konteks sejarah, pengalaman penjara, dan sistem pemilihan umum. Faktor itu saling terkait satu sama lain (Astuti, 2011). Berdasarkan konsep citra perempuan dalam politik ini, penulis mengambil tiga faktor dasar yang dianggap memengaruhi kemunculan pemimpin perempuan di dunia politik di Kabupaten Temanggung, yaitu budaya patriarki, pertalian keluarga, dan sistem pemilihan umum. Budaya patriarki yang sangat dominan di Asia Tenggara dan Selatan sangat membatasi peluang perempuan secara umum untuk terjun di dalam dunia politik, atau lebih jauh lagi memegang tampuk kepemimpinan politik nasional. Berdasarkan budaya patriarki, dominasi kaum laki-laki dilegitimasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik (Astuti, 2011). Budaya patriarki yang ada di Kabupaten Temanggung menjadi kendala perempuan untuk terjun di bidang publik, khususnya politik. Perempuan di Kabupaten Temanggung melalui pemilihan umum berusaha untuk menyejajarkan dirinya dengan kaum laki-laki dalam dunia politik. Bagi perempuan yang menjadi caleg, pertalian keluarga dengan orang yang pandai di bidang politik merupakan dukungan utama bagi caleg perempuan.

### **1.5.2.4 *Networking***

*Network* atau jejaring adalah hubungan antar aktor dalam lingkaran kerja yang sifat hubungannya setara, dijaga atas dasar kepercayaan dan timbal balik. Mereka merupakan koalisi

aktor-aktor yang mempunyai tujuan dan nilai-nilai kepentingan yang berbeda dalam perumusan suatu kebijakan. Jaringan merupakan suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain nya. Oleh karena sebab itu, siapa yang berhasil memegang kuasa dalam komunikasi di suatu jaringan, orang itulah yang memegang kendali atas komunikasi yang ada di jaringan tersebut.<sup>22</sup>

Menurut Robert M.Z Lawang, jaringan merupakan gabungan kata *net* dan *work*, sehingga menjadi *network*, yang penekanannya terletak pada kerja bukan pada jaring, dimengerti sebagaikerja (bekerja) dalam hubungan antar simpul-simpul seperti halnya jaring (net). Maka jaringan menurut Lawang adalah :<sup>23</sup>

1. Ada ikatan antara simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial). Hubungan-hubungan sosial ini diikat dengan kepercayaan. Kepercayaan itu dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak.
2. Ada kerja antara simpul (orang atau kelompok) yang melalui media dengan hubungan sosial menjadi satu kerjasama, bukan kerja bersama-sama.
3. Seperti halnya sebuah jaringan (yang tidak puas) kerja yang terjalin antara simpul itu pasti kuat menahan beban bersama, dan malah dapat “menangkap ikan” lebih banyak.
4. Dalam kerja jaringan itu ada ikatan (simpul) yang tidak dapat berfungsi lagi, sampai simpul itu diperbaiki. Semua simpul menjadi satu kesatuan dan ikatan yang kuat. Dalam hal ini analogi tidak seluruhnya tepat terutama kalau orang yang membentuk jaringan itu hanya dua saja.
5. Media (benang atau kawat) dan simpul tidak dapat dipisahkan, atau antara orang-orang dan hubungannya dapat dipisahkan.

<sup>22</sup> <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm88fded9e71full.pdf>. Diakses pada 18 September 2017 Pukul 20:00 WIB

<sup>23</sup> Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana. Hal. 30-32

6. Ikatan atau pengikat (simpul) adalah norma yang mengatur dan menjaga bagaimana ikatan dan mediana itu dipelihara dan dipertahankan.

Sebuah jaringan atau *network* dapat terbentuk karena berbagai hal, diantaranya adalah:<sup>24</sup>

1. Ada hubungan dua pihak atau lebih
2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan
3. Ada kesepakatan/negosiasi bersama
4. Saling membutuhkan

Terdapat 4 tipe *networking* yang membedakan hubungan antar aktor dalam sebuah ikatan kerjasama yaitu :<sup>25</sup>

a. *Individualistic Network*

*Network* tipe ini bersifat perseorangan. Aktor dalam *individualistic network* bekerja berdasarkan paham perseorangan yang menganggap kemampuannya lebih unggul dibanding mitra kerja lainnya. Tipe ini akan membawa pada kompetisi antar aktor dalam kemitraan itu sendiri. Karena setiap mitra mengejar intensif bagi kepentingannya masing-masing yang didasarkan pada kinerja di kemitraan tersebut. Hubungan sosial *network* model ini dinilai lemah dengan tingkat kecurigaan menjadi lebih besar karena rendahnya kepercayaan masing-masing aktor.

b. *Co-cooperative Networks*

Integrasi sosial tipe ini berada pada level kat dengan tingkat kerjasama yang tinggi dalam merumuskan kebijakan bersama. Berbeda dengan tipe *individualistic* yang rendah dalam hal kepercayaan, tipe ini menekankan kepercayaan sebagai dasar dari pembentukan

---

<sup>24</sup> Ambar Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media. Hal 97

<sup>25</sup> M. Aries Firmanda A. 2017. *Kerjasama Pemerintah Kota Pekalongan dengan Juru Parkir dalam Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2013-2015. Skripsi*. FISIP, Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro Semarang.

jaringan. Hal tersebut membawa tipe ini berbeda pada posisi yang lemah dalam aturan sosial, posisi setiap aktor berada pada titik yang sama dengan kepentingan kelompok yang berbeda, hal ini akan menyulitkan pengambilan keputusan yang mampu mencakup keinginan semua pihak. Biasanya hasil keputusan bersama terlalu besar jangkauannya.

c. *Project Networks*

Hubungan dalam *network* seperti ini diandaikan seperti suatu proyek. Aliansi terbentuk sementara selama proyek kerja berlangsung. Dasar semacam ini menjadikan tipe ini lemah dalam hubungan sosial. Walaupun dinilai ikatan anatar aktor secara personal kurang, tipe ini lebih berfokus pada hubungan professional dengan tujuan yang jelas dan terukur secara pasti.

d. *Enduring Networks*

Jaringan tetap seperti ini memudahkan setiap aktor dalam mengambil tindakan bersama. Hubungan professional dan personal setiap aktor telah terbentuk melalui jaringan ini. Tujuan dari jaringan ini kurang terpacu mengeksplor kemampuan untuk berkembang tetapi bentuk pertanggung jawaban dari setiap aktivitas lebih jelas dengan terpusatnya kekuasaan jaringan.

Dalam teori jaringan selalu didasarkan pada asumsi bahwa relasi para aktor itu bersifat saling tergantung satu sama lain (*interdependence*). Dalam makna yang lebih operasional, bahwa aktor tidak bakal mampu mencapai tujuan-tujuan tanpa menggunakan sumberdaya yang dimiliki oleh aktor lain. Mekanisme saling ketergantungan ini berjalan melalui adanya pertukaran (*exchange*) sumber daya antar aktor.<sup>26</sup> Kemudian interaksi dan mekanisme pertukaran sumberdaya-sumberdaya dalam jaringan itu akan terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>26</sup> Pratikno. 2008. *Manajemen Jaringan dalam Perspektif Strukturasi*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi publik. Magister Adminitrasi Publik Universitas Gajah Mada. Hal 5



Menurut Pratikno ada tujuh variabel yang dapat dijadikan ukuran dalam efektivitas pengelolaan jejaring atau network, yaitu:<sup>27</sup>

1. **Transparan.** Dalam kerjasama harus ada transparansi, berupa kemudahan proses pengawasan atau penegasan kepatuhan anggota dengan prinsip utama kerjasama. Suatu network akan efektif jika ada kepatuhan dari anggotanya dan memenuhi aturan yang tercantum dalam hak-hak dan kewajiban mereka.
2. **Kekokohan dan keluwesan.** Efektivitas sebuah network tergantung pada adanya kekokohan dan keluwesan dalam menyelenggarakan segala persoalan yang timbul, serta adanya keluwesan dalam menyikapi perkembangan yang terjadi antar anggota tanpa melalui perubahan radikal.
3. **Perubahan aturan.** Perubahan aturan yang terlalu sering dilakukan akan menyebabkan kerjasama network tidak efektif, perubahan aturan justru akan melemahkan afektivitasnya karena ada peluang anggota untuk selalu merubah aturan yang dipandang memberatkan. Perubahan aturan yang sulit dilakukan justru akan menjaga keefektivitasan kerjasama karena akan mendorong anggota untuk mentaati aturan kerjasama.
4. **Kapasitas anggota dalam jejaring.** Efektivitas sebuah kerjasama sangat tergantung pada kapasitas anggotanya dalam mengimplementasikan aturan yang telah dibuat. Keterbatasan sumberdaya anggota dalam network menjadi penghambat pelaksanaan network itu sendiri. Apabila ini terjadi maka efektivitas dari network akan melemah.
5. **Distribusi kekuasaan.** Ketimpangan yang tajam dalam distribusi kekuasaan diantara anggota akan membatasi efektivitas kerjasama, karena akan ada anggota yang sangat dominan dan dapat memaksakan kemauan anggota lain. Keseimbangan pembagian kekuasaan antar anggota akan menjadikan kerjasama lebih efektif karena tidak adanya kekuatan yang cukup besar untuk melawan kesepakatan yang telah dibuat.

---

<sup>27</sup> Op cit. Hal 62-66

6. Tingkat ketergantungan antar anggota. Efektivitas kerjasama akan tergantung pada tingkat ketergantungan antar anggotanya. Ketergantungan timbul apabila aksi dari satu anggota mempengaruhi kesejahteraan anggota lain dalam *network*. Mereka yang tergantung akan sangat sensitif terhadap perilaku aktor lain, sehingga antar anggota akan saling menjaga interaksi mereka untuk tidak bertentangan.
7. Ide intelektual. Suatu jaringan tidak dapat bertahan efektif dalam jangka waktu lama apabila substruktural intelektual yang mendasarinya runtuh atau mengalami pengikisan. Efektivitas kerjasama sangat dipengaruhi oleh kekuatan ide dan gagasan yang mendasarinya. Efektivitas sebuah kerjasama akan sangat tergantung pada kuat lemahnya ide-ide atau gagasan yang mendasarinya.

Dalam suatu organisasi publik modern keberadaan *stakeholder* dalam *network* mutlak diperlukan untuk memperlancar segala kegiatan/proyek yang dilakukan. Untuk itu diperlukan beberapa metode dalam menetapkan *stakeholder* agar *stakeholder* yang dipilih tepat. David Viney, menawarkan dua metode yaitu *stakeholder analysis* dan *stakeholder management* :<sup>28</sup>

#### 1. *Stakeholder analysis*

- a. Tahap pertama: Perlu dibedakan antara pengaruh dan kepentingan dari masing-masing individu dalam *stakeholder*. Jika *stakeholder* memiliki pengaruh dan kepentingan maka mereka adalah *stakeholder* primer dan untuk keberhasilan kegiatan mereka harus dilibatkan penuh dalam seluruh tahapan kegiatan. Jika *stakeholder* hanya memiliki kepentingan atau pengaruh saja, mereka adalah *stakeholder* sekunder yang selalu diarahkan selama kegiatan berlangsung.
- b. Tahap kedua: memahami posisi dari masing-masing *stakeholder* dengan tetap menghormati tujuan kegiatan dan hasil yang diinginkan. Untuk itu diperlukan survey

---

<sup>28</sup> Sri Suwitri. 2008. *Jejaring Kebijakan dalam Perumusan Kebijakan Publik Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Kota Semarang*. Semarang: badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hal 70-72

dan interview utamanya untuk mengetahui tingkat kesepakatan dan komitmen dari masing-masing *stakeholder*.

## 2. *Stakeholder management*

Jejaring kebijakan merupakan suatu hubungan yang terbentuk akibat koalisi diantara aktor pemerintah, masyarakat termasuk privat. Aktor kebijakan sering juga disebut sebagai *stakeholder*. Manajemen *stakeholder* adalah suatu pendekatan terhadap *stakeholder* dengan menyesuaikan kondisi *stakeholder* yaitu:

### a. Rekan Kerja (*partner*)

*Stakeholder* primer adalah pihak yang mendukung dalam perencanaan dan implementasi dari seluruh kegiatan. *stakeholder* ini harus didampingi untuk meningkatkan kesepakatan dan komitmen mereka terhadap kegiatan.

### b. Konsultasi (*consult*)

*Stakeholder* sekunder dengan pengaruh yang lebih tinggi tetapi tingkat kepentingan yang rendah membutuhkan perhatian melalui konsultasi secara aktif untuk memperoleh opini dan input mereka sehingga dapat diperoleh keputusan kunci dimana mereka akan terpengaruh secara langsung. Hasil konsultasi menjadi strategi untuk meningkatkan komitmen mereka.

### c. Informasi (*inform*)

*Stakeholder* sekunder dengan pengaruh yang lebih rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi membutuhkan informasi tentang keputusan yang ditetapkan dan mungkin berdampak langsung terhadap mereka, agar mereka tetap terlibat dalam acara-acara penting yang berhubungan dengan keputusan walaupun tidak aktif dalam pembuatan keputusan.

### d. Kontrol (*Control*)

Kontrol diperlukan bagi *stakeholder* yang tidak mempunyai kepentingan atau pengaruh

dan mereka memberikan bantuan hanya untuk menghormati keputusan yang ditetapkan.

Ketika jejaring atau *network* sudah terbangun, tantangan selanjutnya adalah bagaimana strategi dalam mengelola *network* tersebut. Setidaknya ada lima manajemen menurut Milward dan Provan agar pengelolaan *network* dapat berjalan dengan efektif:<sup>29</sup>

1. *Management of accountability*

Dalam suatu *network* semua berperan sebagai mitra, sehingga hal ini akan berakibat pada tidak adanya rantai komando sehingga menyebabkan manajer *network* harus berhasil melakukan negosiasi. Dengan isu utama adalah menentukan siapa yang bertanggungjawab, untuk apa dan bagaimana menanggapi *free riders* yang tidak memberikan sumbangan yang mencukupi tapi meminta banyak sumber daya.

2. *Management of Legitimacy*

Suatu *network* merupakan kegiatan kerjasama yang harus selalu menegosiasikan legitimasinya, terutama jika melibatkan sektor publik, privat maupun non profit. Manajer organisasi yang terlibat dalam *network* harus terus menerus meyakinkan para *stakeholder* bahwa kerja mereka dalam *network* akan selalu bermanfaat dan berarti besar bagi organisasi.

3. *Management of Conflict*

Konflik dapat muncul dari perbedaan tujuan organisasi anggota *network*, dan akibatnya tidak dapat diselesaikan melalui komando dari atas. Penting bagi manajer *network* untuk selalu mendengarkan suara dari para anggota dan membuat mekanisme resolusi konflik. Ini akan sangat berguna dalam menciptakan alat penyelesaian konflik diantara manajer organisasi anggota *network* dan manajer *network*.

4. *Management of design*

Sebagaimana organisasi memiliki pilihan desain, *network* juga memiliki pilihan desain.

---

<sup>29</sup>[www.businessofgovernment.org](http://www.businessofgovernment.org) diakses pada 26 September 2017 Pukul 21:00WIB

Pada awal fase evolusi *network*, biasanya dengan anggota yang sedikit desain *network* yang dipilih adalah *self governed network* yang dijalankan atas dasar konsensus. Fase kritis dari perkembangan *network* terjadi ketika struktur yang ada gagal menjalankan fungsinya dan kemudian akan dikembangkan menjadi fase *lead organization network*, dimana salah satu anggota *network* akan menanggung beban tanggung jawab atas tugas-tugas lainnya. Selanjutnya fase desain *administrative organization network* merupakan pilihan yang mungkin akan tepat, disini para anggota *network* menciptakan spesifikasi organisasi yang akan menangani manajemen *network* disini para sebagian anggota dapat dijadikan dan dimasukkan dalam dewan redaksi.

##### 5. *Management of commitmens*

Manajemen komitmen yang diperlukan karena bila terjadi anggota merasa tidak terlalu merasakan manfaat *network* dibandingkan dengan anggota lainnya, manajer *network* harus terus menerus memonitor kekuatan sentripetal (memecah) yang menjadi ancaman keutuhan *network*. Manajer harus bisa secara langsung menangani realitas atau persepsi akan adanya distribusi sumber daya yang tidak sama. *PeI Training dan joint joint problem solving* akan menjadi cara yang efektif untuk dilema komitmen ini.

Jaring merupakan hubungan antar aktor dalam lingkaran kerja yang sifat hubungannya setara, dijaga atas dasar kepercayaan dan timbal balik yang mempunyai tujuan dan nilai-nilai kepentingan yang sama. Jaringan dapat terbentuk karena adanya aktor-aktor baik itu teman maupun relasi yang mempunyai tujuan yang sama. Dalam dunia politik, jaringan digunakan sebagai upaya untuk bisa mendapatkan suara di masyarakat, dimana jaringan tersebut bisa berasal dari partai politik, teman maupun keluarga. Untuk dapat bekerja secara maksimal, maka sebuah jaringan harus ada pembagian kerja atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan agar nantinya lebih efektif dan efisien sehingga jaringan yang terbentuk tidak sia-sia.

### 1.5.2.5 Partai politik

Partai politik menjadi salah satu pilar kehidupan politik modern yang demokratis. Didalam berorganisasi sebuah partai politik akan melibatkan rakyat karena demokrasi sendiri merupakan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Sebuah partai politik yang ideal tentunya memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara legitimate dan damai. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis.<sup>30</sup>

Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2008 pasal 1 mengidentifikasi partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Raepublik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa partai politik merupakan kelompok-kelompok yang terorganisir angota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.<sup>31</sup> Partai politik sebagai isntrumen perwakilan dan sarana untuk menjamin pergantian pemerintahan secara teratur dan tanpa pergolakan yang dapat menghancurkan masyarakat dan negara. Di negara berkembang seperti Indonesia pertumbuhan dan aktivitas partai politik berkaitan dengan proses pembentukan identitas nasional, pembentukan kerangka sistem politik, pengabsahan lembaga pemerintahan, dan usaha untuk

---

<sup>30</sup> Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal.15

<sup>31</sup> Inu Kencana Syafiiie dan Azhari. 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal.74

menguatkan persatuan nasional.

Untuk memahami peran partai politik, akan lebih mudah apabila memahami terlebih dahulu fungsi dari partai politik seperti yang dijelaskan oleh Miriam Budiardjo dalam A. Rahman H. I (2007) terkait fungsi partai politik yang melekat dalam suatu partai politik sebagai berikut.<sup>32</sup>

#### 1. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat ditengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tidak berbekas apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada, proses tersebut dinamakan (*interest aggregation*). Setelah penggabungan pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang (*interest articulation*). Jika peran utama ini tidak dilakukan pasti akan terjadi kesimpang siuran isu dan saling berbenturan.

Setelah itu, partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan yang kemudian dimasukkan dalam program atau *platform* partai untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Demikianlah tuntutan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi dua arus komunikasi dari atas ke bawah maupun bawah ke atas informasi tersampaikan dengan baik. Peran partai sebagai penghubungan sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu perlu dijelaskan kepada seluruh masyarakat, dan dipihak lain juga pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.

---

<sup>32</sup> A. Rahman H. I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal.103-104

## 2. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan sebuah proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Proses ini merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa karena proses penyampaiannya tersebut berupa norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya. A. Rahman H. I. juga mengatakan bahwa fungsi sosialisasi politik partai juga dapat dipandang sebagai suatu upaya menciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Lebih penting lagi apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi untuk mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan bersama.

## 3. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partainya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

## 4. Pengatur Konflik Politik

Pengatur konflik politik merupakan fungsi untuk membantu mengatasi konflik diantara masyarakat atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Pendapat lain menurut ahli Arend Lijph, perbedaan-perbedaan atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diantara elite-elite politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite



politik.

Partai politik dapat diartikan sebagai sebuah kelompok dimana kelompok tersebut mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Secara ringkas partai politik dapat dikatakan sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintahnya. Partai politik merupakan jembatan bagi seseorang untuk memperoleh kekuasaan sehingga ia bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Selain itu partai juga melakukan fungsi-fungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik politik, pendidikan politik, pemersatu kebangsaan untuk mensejahterakan masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya.

#### **1.5.2.6 Pemilu Legislatif**

Pemilihan umum legislatif adalah pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dalam Negara Kesatuan Republik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>33</sup> Pemilu Legislatif sudah dimulai sejak tahun 1955, dimana pada saat itu anggota DPR dan MPR. Dengan dikeluarkan UU No.10 Tahun 2008, Pemilu Legislatif tidak hanya untuk memilih anggota DPR, MPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota saja tetapi juga untuk memilih DPD. Pemilu perlu diselenggarakan karena merupakan salah satu elemen pokok demokrasi (sebagai perwujudan kedaulatan rakyat), yakni paham politik yang beranggapan bahwa kedaulatan negara terletak ditangan rakyat.

Pemilu merupakan *“the means by which the mass public, monitors and direct the action*

---

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat 2 UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Legislatif

*of those persons responsible for policy making*” (sarana dimana masyarakat memonitor atau mengamati serta mengarahkan tindakan orang-orang yang bertanggung jawab dalam membuat kebijakan).<sup>34</sup> Pemilu bukan hanya sebagai sarana monitor dan pengamatan masyarakat saja. Akan tetapi pemilu juga sebagai wadah dalam mewujudkan pilar demokrasi yaitu bahwa kedaulatan ditangan rakyat. Hal ini berarti melalui pemilu, masyarakat mempunyai hak dalam memilih pemimpin yang mampu dalam memperjuangkan aspirasinya. Pemilu merupakan suatu peristiwa dimana pemerintah mempertahankan kebijakan-kebijakan mereka dan para pemilih memberikan penilaian. Andai kata kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan mereka tetap berkuasa. Akan tetapi apabila tidak, mereka harus mundur. Sementara itu, pemilu itu sendiri mengabsahkan pemerintah dengan cara memberikan mandat untuk bertindak selanjutnya.<sup>35</sup> Selain itu dalam penyelenggaraan juga harus dilakukan pengelolaan proses pemilihan umum secara independen dan tidak memihak suatu golongan sehingga nantinya pemilu dapat berjalan sesuai dengan azas azas dalam penyelenggaraan pemilu (JURDIL & LUBER).<sup>36</sup>

Menurut UU No.1 Tahun 2008 Tentang Pemilu Legislatif, Juga menjelaskan bahwa pemilu harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta juga harus mempunyai 6 azas(prinsip) utama demi terselenggaranya pemilu yang demokratis adalah sebagai berikut :

- a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).

---

<sup>34</sup> Prandhawarti,ari dan tri cahyo utomo.2008. *Pemilu dan Demokrasi*. Semarang:FISIP Undip cetakan 1 halaman 2

<sup>35</sup> Prandharwanti,ari dan tri cahyo utomo,Op.cit halaman 3

<sup>36</sup> Goodwin Guy S,-Gill. 1999. *PEMILU JURDIL : Pengalaman dan Standart Internasional*. Diterjemahkan Oleh Nurhasan. Jakarta: PIRAC-The Asia Foundation Cetakan 1 Halaman 43

- c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*).
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, asas dalam pemilihan umum terdapat dalam Pasal 2 yaitu:

*a. Mandiri. b. Jujur. c. Adil. d. Kepastian hukum. e. Tertib penyelenggara pemilu. f. Keterbukaan. g. Proporsionalitas. h. Profesionalitas i. Akuntabilitas. J. Efisiensi dan k. Efektivitas.*

Selain azas-azas tersebut pemilu harus melewati beberapa tahapan berikut ini

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
3. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
4. Penetapan peserta Pemilu;
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota;
7. Masa kampanye pemilu;

8. Masa tenang;
9. Pemungutan dan perhitungan suara;
10. Penetapan hasil pemilu; dan
11. Pengucapan janji/sumpah anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota.

Menurut pasal 26 UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif dalam menyelenggarakan pemilu legislatif kabupaten/kota, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh).
2. Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
  - a. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
  - b. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
  - c. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
  - d. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
  - e. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;

- f. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
- g. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi.

Jadi untuk merebut kursi kepemimpinan , seorang calon legislatif harus mempunyai strategi politik yang baik. Sehingga nantinya mampu memenangkan perebutan kursi jabatan politik melalui pemilu legislatif.

### 1.5.2.7 Marketing Politik

Menurut Lees Marshmant, marketing politik harus dilihat secara komprehensi. Pertama, marketing politik lebih daripada sekedar komunikasi politik. Kedua, marketing politik diaplikasikan dalam seluruh proses organisasi partai politik. Tidak hanya tentang kampanye politik tetapi juga sampai pada tahap bagaimana memformulasikan produk politik melalui pembangunan simbol, *image*, *platform* dan program yang ditawarkan. Ketiga, marketing politik menggunakan konsep marketing secara luas, tidak hanya terbatas pada teknik marketing, namun juga sampai strategi marketing, dari teknik publikasi, menawarkan ide dan program, serta desai produk sampai ke *market intelligent* dan pemrosesan informasi. Keempat, marketing politik melibatkan banyak disiplin ilmu dalam pembahasannya, seperti sosiologi dan psikologi. Kelima, konsep marketing politik bisa diterapkan dalam berbagai situasi politik, mulai dari pemilihan umum sampai ke proses lobi di parlemen.<sup>37</sup>

Dalam marketing politik kita mengenal 4Ps (*product, promotion, price, place*) produk politik.

1. *Product* (produk), produk yang ditawarkan institusi politik merupakan sesuatu yang kompleks, dimana pemilih akan menikmatinya setelah sebuah partai atau seorang kandidat terpilih. Arti penting sebuah produk politik tidak hanya ditentukan oleh karakteristik

---

<sup>37</sup> Firmanzah. 2007. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 202-203

produk itu sendiri. Pemahaman pemilih juga memainkan peranan penting dalam memaknai dan menginterpretasikan sebuah prodek politik. Menurut Niffenegger membagi produk politik dalam 3 kategori: *party platform* (platform pribadi), *past record* catatan tentang hal-hal yang dilakukan di masa lampau), *personal characteristic* (ciri pribadi).

2. *Promotion* (promosi), institusi politik seringkali bekerja sama dengan sebuah agen iklan dalam membangun slogan, jargon dan citra yang akan ditampilkan. Selain itu, mereka kerap kali menggunakan media sebagai alat promosi, namun demikian, tidak semua media cocok digunakan untuk melakukan promosi. Oleh karena itu, dalam pemilihan media harus difikirkan dengan matang agar media tersebut bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Promosi bisa dilakukan dengan cara debat di TV atau dengan cara pengerahan masa dalam jumlah besar untuk menghadiri sebuah acara. Selain ingin tetap menjaga hubungan antar institusi politik dengan massanya, kesempatan semacam ini ini juga bisa diliput oleh media sehingga secara tidak langsung bisa dilihat sebagai media promosi. Lambang, simbol dan warna bendera partai yang disebar melalui pamflet, umbul-umbul dan poster semasa periode kampanye juga merupakan media promosi institusi politik.
3. *Price* (harga), harga dalam marketing politik mencakup banyak hal, mulai dari ekonomi, psikologi sampai ke citra nasional. Harga ekonomi meliputi semua biaya yang dikeluarkan institusi politik selama periode kampanye. Dari biaya iklan, publikasi, biaya “rapat akbar” sampai ke biaya administrasi pengorganisasian. Harga psikologis mengacu pada harga persepsi psikologis, misalnya apakah pemilih merasa nyaman dengan latar belakang etnis, agama, pendidikan dan lain-lain. Harga *image* nasional berkaitan dengan apakah pemilih merasa kandidat calon tersebut bisa memberi citra positif suatu bangsa dan negara serta bisa menjadi kebanggaan nasional atau tidak. Suatu institusi politik berusaha untuk meminimalisir harga produk politik (minimalisir risiko) mereka dan meningkatkan

- (maksimalisasi) harga politik lawan. Menjadikan harga politik lawan semakin mahal (semakin berisiko) merupakan strategi yang bisa digunakan partai politik guna memperoleh dukungan publik, sebab pemilih akan memilih partai atau kontestan yang memilih risiko atau harga relatif paling kecil. Menurut Lock dan Harris melihat tidak adanya pengenaan harga ketika orang melakukan proses pembelian produk politik. Hal inilah yang sering membedakan pembelian politik dengan pembelian komersial. Orang yang datang ke bilik suara tidak akan dipungut biaya sepeserpun. Bahkan seringkali mereka diiming-imingi *reward* oleh para kontestan dalam bentuk uang atau fasilitas lainnya.
4. *Place* (tempat), tempat berkaitan erat dengan cara hadir atau distribusi sebuah institusi politik dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih atau calon pemilih. Kampanye politik memang harus bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Sebuah institusi politik harus bisa mengidentifikasi dan memetakan struktur serta karakteristik masyarakat. Pemetaan ini dilakukan secara geografis. Identifikasi dilakukan dengan melihat konsentrasi penduduk di suatu wilayah, penyebarannya dan kondisi fisik geografisnya. Pemetaan juga bisa dilakukan secara demografis, dimana pemilih dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, usia, kelas sosial, pemahaman akan dunia politik, kepercayaan agama, dan etnis.<sup>38</sup>

Segmentasi atau pemetaan penting dilakukan mengingat institusi politik diharapkan dapat selalu hadir dalam berbagai karakteristik pemilih. Hadir tidaknya suatu institusi politik selalu diartikan sebagai keberadaan fisiknya di tengah-tengah masyarakat, misalnya melalui kunjungan ke daerah-daerah terpencil tau perbatasan. Kehadiran yang dimaksud yaitu apakah institusi politik tersebut mampu menjawab permasalahan yang dihadapi di masing-masing lapisan masyarakat. Institusi politik dituntut untuk bisa membuat program yang bisa

---

<sup>38</sup> Firmanzah. 2003. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal 200-208

memuaskan segenap lapisan masyarakat untuk bisa memperoleh suara sebesar mungkin.

Smith dan Hirst berpendapat bahwa institusi politik perlu melakukan segmentasi politik. Ada beberapa hal yang menyebabkan institusi politik harus melakukan segmentasi politik. Pertama, tidak semua segmen pasar harus dimasuki. Hanya segmen pasar yang memiliki ukuran dan jumlah signifikanlah yang sebaiknya diperhatikan. Kedua, sumberdaya partai politik bukanlah tidak terbatas. Seringkali partai politik harus melakukan aktivitas yang menjadi prioritas utama mengingat keterbatasan sumberdaya. Ketiga, terkait dengan efektifitas program komunikasi politik yang dilakukan. Keempat, segmentasi ini perlu dilakukan dalam iklim persaingan politik.<sup>39</sup>

Segmentasi dengan *positioning* adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Segmentasi sangat dibutuhkan untuk dapat mengidentifikasi karakteristik yang muncul disetiap kelompok masyarakat. Sementara *positioning* adalah upaya untuk menempatkan *image* dan produk politik yang sesuai dengan masing-masing kelompok masyarakat.<sup>40</sup>

Marketing politik adalah pendekatan komprehensif dalam hal menyangkut cara sebuah institusi politik ketika memformulasikan produk politik, menyusun program publikasi kampanye dan komunikasi politik, strategi segmen untuk memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat sampai ke perhitungan harga sebuah produk politik. Kondisi sosial budaya suatu wilayah geografis dan demografis juga harus diperhitungkan dalam segmentasi dan formulasi isu politik.

## 1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana strategi calon anggota legislatif perempuan Fraksi PDI–Perjuangan dalam meningkatkan elektabilitas pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Temanggung melalui partai politik untuk

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, Hal 210

<sup>40</sup>*Ibid.*, Hal 211



mengetahui peran partai politik dalam rekrutmen, pencalonan hingga strategi kemenangan anggota legislatif perempuan dari fraksi PDI-Perjuangan, calon legislatif untuk mengetahui kualitas calon serta basis pendukung yang digunakan oleh anggota legislatif perempuan dari fraksi PDI-Perjuangan dalam memperoleh dukungan masyarakat, dan strategi politik untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam meningkatkan elektabilitas kemenangan anggota legislatif perempuan dari fraksi PDI-Perjuangan.

Untuk bisa mengetahui bagaimana strategi yang digunakan oleh anggota legislatif perempuan Fraksi PDIP pada Pemilu 2014 sehingga bisa mendapat dukungan dari masyarakat, peneliti menggunakan Teori Marketing Politik. Dalam teori Marketing Politik menurut Firmanzah, terdapat 4 aspek yaitu *product* (produk), *promotion* (promosi), *price* (harga), *place* (tempat). Pertama, *product* (produk) dalam hal ini peneliti akan meneliti bagaimana produk yang ditawarkan oleh para anggota legislatif perempuan terpilih termasuk program-programnya untuk bisa memperoleh suara di masyarakat. Produk bisa berupa visi misi atau program kerja yang disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa tertarik. Kedua, *promotion* (promosi) digunakan untuk mengetahui strategi apa yang digunakan oleh para anggota legislatif perempuan terpilih untuk mendukung program-program tersebut. Baik berupa iklan, hiburan maupun tatap muka secara langsung kepada masyarakat. Ketiga, *price* (harga) dimana penelitian ini akan mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota legislatif perempuan untuk mendapatkan suara di masyarakat dengan melihat program-program yang tawarkan dan media promosi yang digunakan.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

Desain penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus.<sup>42</sup>

Adapun alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar. Selain itu semua data yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.<sup>43</sup> Penelitian kualitatif menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dibandingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sumber data.

### **1.7.1 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang, sekelompok orang atau organisasi, benda dan sesuatu hal yang menjadi sumber informasi penelitian. Subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi

---

<sup>41</sup>Haris Herdiansyah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. Hal 9

<sup>42</sup>Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana. Hal 68

<sup>43</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2009, cet. 26 Hal: 11

dan kondisi latar penelitian.<sup>44</sup> Peran subjek penelitian menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian karena menentukan keberhasilan seorang peneliti dalam mendapatkan informasi atau data untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah ditentukan.

Pada penelitian ini, peneliti meneliti tentang strategi keterpilihan calon anggota legislatif perempuan PDI-Perjuangan pada Pemilu 2014 di Kabupaten Temanggung. Alasan peneliti mengambil PDI-Perjuangan yaitu karena partai tersebut merupakan partai yang menempati peringkat pertama pada perolehan suara Pemilu 2014 di Kabupaten Temanggung. Tidak hanya di tahun 2014, pada pesta demokrasi tahun 2009 partai tersebut juga menempati posisi yang sama. PDI-Perjuangan dengan basis nasionalis dengan mengandalkan tokoh-tokoh masyarakat tentunya juga mempunyai strategi tersendiri untuk bisa mengimbangi partai politik lain. Selain itu, dari Pemilu 2009 ke Pemilu 2014 partai tersebut juga terjadi peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan terpilih. Dengan jumlah total 3 orang anggota legislatif perempuan yang menjadi narasumber untuk dapat diketahui strategi apa saja yang digunakan sehingga dapat meningkatkan elektabilitasnya dan akhirnya terpilih. Jumlah tersebut terdiri dari 3 orang perempuan dari PDI-Perjuangan.

Selain 3 narasumber calon Anggota Legislatif perempuan dari Fraksi PDI-Perjuangan, terdapat narasumber dari tim pemenangan yang terdiri dari 3 orang untuk mengetahui peran dari masing-masing dalam pemenangan anggota legislatif perempuan. Selain itu, ada juga dari perwakilan partai pengusung yaitu PDI-Perjuangan untuk mengetahui bagaimana peran partai terhadap masing-masing calon perempuan tersebut, serta perwakilan dari penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dan Panwas Kabupaten Temanggung untuk mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan Pemilu 2014 di Kabupaten Temanggung. Sehingga total narasumber dalam penelitian yaitu 10 orang. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu suatu metode penarikan sampel probabilitas

---

<sup>44</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010, Hal. 132

yang dilakukan dengan kriteria tertentu. Adapun profil dari narasumber pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Penyelenggara Pemilu:**

KPU Kabupaten Temanggung

Nama : Arimurti Hendro Wardani

Alamat: Kandangan Temanggung

Jabatan: Komisioner KPU Kabupaten Temanggung

Sebagai penyelenggara Pemilu tentunya bukan hal mudah. Semua harus berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini, kedua narasumber dari penyelenggara Pemilu merupakan orang-orang yang memang sudah berpengalaman, Ari menjabat sebagai Komisioner KPU Kabupaten Temanggung sudah dua periode dan terbukti sampai sekarang tidak terjadi permasalahan yang berarti dalam penyelenggaraan Pemilu.

**Panwaskab Temanggung Pemilu 2014**

Nama : Erwin Nurachmani Prabawanti

Alamat: Jl. Angrek 1 / 25 Bendo Kertosari Temanggung

Jabatan: Ketua Banwaslu Kabupaten Temanggung

Erwin yang pada Pemilu 2014 menjadi Anggota Panwaskab tentunya juga tidak kalah pengalaman dalam hal pengawasan Pemilu. Saling kordinasi menjadi kunci agar permasalahan yang dihadapi di lapangan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tentunya setiap penyelenggaraan Pemilu diharapkan dapat berjalan lancar tanpa ada halangan apapun seiring bertambahnya kualitas dari penyelenggara Pemilu.

**Pengurus partai (PDI-Perjuangan)**

PDI-Perjuangan Kabupaten Temanggung

Nama : Adi

Alamat: Suropadan Pringsurat Temanggung

Jabatan: Ketua TimSes PDI-P

Partai mempunyai peran penting dalam pencalonan anggota legislatif karena partai harus mencari orang-orang terbaik untuk dicalonkan. Melalui persyaratan yang sudah ditetapkan kemudian partai menseleksi calon-calon yang mempunyai potensi dan mampu bersaing pada Pemilu 2014. Persaingan pada setiap Pemilu sangatlah ketat karena masing-masing calon harus bersaing dengan calon lainya termasuk bersaing dengan calon dari satu partai.

### **Anggota Legislatif Perempuan Fraksi PDI-Perjuangan**

Nama : Intan Kurniasari

Alamat: Jl. Kartini Nomor 9 Kertosari Temanggung

Jabatan: Anggota DPRD / Sekretaris Fraksi PDI-P

Intan Kurniasari pada Pemilu 2014 Kabupaten Temanggung merupakan pencalonan yang pertama bagi Intan Kurniasari karena sebelumnya belum pernah turut dalam pemilu. Selain pengalamanya dibidang legislatif, Intan juga aktif di kegiatan-kegiatan organisasi dan partai. Intan Kurniasari senang untuk berinteraksi dengan masyarakat. Intan aktif berpolitik karena mendapatkan dukungan partainya, yang menjadi motor penggerak bagi dirinya untuk dapat terpilih. Dan terbukti, Pemilu 2014 Intan terpilih menjadi anggota legislatif untuk pertama kalinya.

Nama : Ika Rizkiwati

Alamat: Jl. Gajah Mada dalam II / 19 Maron Baru Temanggung

Jabatan: Anggota DPRD / Komisi C

Ika Rizkiwati adalah seorang perempuan yang masih muda namun memiliki semangat berpolitik yang tinggi. Sebelum mencalonkan diri menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2014 Kabupaten Temanggung, Ika Rizkiwati memang sudah aktif di beberapa organisasi kepemudaan, dan organisasi perempuan. Beliau baru tergabung kedalam struktural partai pada tahun 2014. karena sebelumnya belum pernah terlibat dalam dunia politik. Dengan

mengandalkan relasi yang dimilikinya melalui organisasi yang beliau ikuti tersebut, pada Pemilu 2014 Kabupaten Temanggung Ika Rizkiwati dapat terpilih menjadi anggota legislatif Kabupaten Temanggung.

Nama : Titik Winarti

Alamat: Kauman RT 1/RW1 Jumo Temanggung

Jabatan: Ketua Fraksi PDI-P Kabupaten Temanggung/ Komisi D DPRD Temanggung

Pada Pemilu 2014 Kabupaten Temanggung, Titik memperoleh 4.661 suara. Titik merupakan pengurus partai di tingkat kecamatan pada tahun 2009. Sebelumnya beliau merintis karir politiknya dari tingkat paling bawah yaitu desa. Hal tersebut yang menjadikan Titik Winarti banyak dikenal oleh simpatisan PDI-P dan para pengurus partai. Dari kepengurusan partai tersebut Titik Winarti mantap untuk mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif Kabupaten Temanggung tahun 2014, dan akhirnya beliau terpilih menjadi salah satu anggota legislatif perempuan dari PDI-Perjuangan.

### **Tim Pemenangan**

Nama : Trimo

Alamat : Kemloko Tembarak Temanggung

Pekerjaan: Petani

Trimo adalah timses dari Ika Rizkiwati. Pada saat pencalonan Ika Rizkiwati, Trimo adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk mencari masa di kecamatan Tembarak. Dengan adanya Trimo, Intan Kurniasari sangat terbantu dalam mencapai targetnya. Trimo berperan penting dalam kemenangan Ika Rizkiwati karena sebelumnya Ika tidak mengenal politik dan partai. Trimo menjadi Ketua kemenangan Ika Rizkiwati dibantu dengan keluarga besar Ika Rizkiwati serta tim sukses lainnya. Trimo juga melibatkan generasi muda untuk ikut mendukung Ika Rizkiwati, melihat Ika Rizkiwati masih muda, dan merepresentasikan semangat kepemudaan. Perjuangan dan kerja kerasnya membuat Intan terpilih padahal bukan

dari struktural partai.

Nama : Sri Hartono

Alamat: Jumo, Pestan Gedongsari Temanggung

Pekerjaan: Wiraswasta

Sri Hartono merupakan relawan dari Titik di Kecamatan Jumo. Perkenalannya dimulai sudah beberapa tahun lalu saat Titik sudah ikut berkecimpun di kepengurusan PDI-P tingkat kecamatan. Peran Sri Hartono sangat penting karena melihat persaingan antar calon. Dalam kampanyenya, Sri Hartono mengajak masyarakat untuk memilih wakil dari daerahnya sendiri sehingga tercipta pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Dalam pemenangannya, Sri Hartono bergabung dengan relawan lainnya yang terdiri dari 10-12 orang di setiap desa.

Nama : Rindam

Alamat: Kledung Temanggung

Pekerjaan: Wiraswasta

Rindam adalah sahabat dari Intan. Dalam pencalonan Intan, Rindam terlibat dalam kemenangan. Awal ketertarikan Intan Kurniasari untuk terjun dalam politik adalah saat masuk kedalam tim sukses kemenangan bupati Bambang Karno. Lalu ada dukungan dari partai untuk terus berkarir politik. Rindam menjadi penghubung antara Intan Kurniasari dengan masyarakat pada dapilnya. Sehingga peran dari Rinda dan tim sukses sangat dibutuhkan untuk bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat.

**Tabel 1.3**

**Data Informan**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Kategori Informan</b>
1.	Ika Rizkiwati	Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Fraksi PDIP	Informan utama
2.	Intan Kurniasari	Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Fraksi PDIP	Informan utama

3.	Titik Winarti	Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Fraksi PDIP	Informan utama
4.	Ari Murti Hendro Wardani	Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung	Secondary informan
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Kategori Informan</b>
5.	Adi	Ketua Tim Pencalonan DPC PDI-P Temanggung	Secondary informan
6.	Trimo	Petani	Secondary informan
7.	Sri Hartono	Wiraswasta	Secondary informan
8.	Rindam	Wiraswasta	Secondary informan
9.	Erwin Nurachmani Prabawanti	Ketua Banwaslu Kabupaten Temanggung	Secondary informan

Sumber: *Data Olah Peneliti, 2018*

### 1.7.2 Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif kali ini menggunakan data yang berupa: teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang menggambarkan atau merepresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial yang terkait dengan penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Kabupaten Temanggung.

Sedangkan untuk sumber datanya sendiri dalam penelitian ini akan mendapatkan data yang mampu diperoleh dari sumber dari data primer dan data sekunder. Menurut Arikunto (2006:129), yang dimaksudkan dengan sumber data dalam penelitian ialah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari:

#### 1. Data Primer

Merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data ini diambil menggunakan teknik seperti wawancara terhadap anggota legislatif perempuan fraksi PDI-Perjuangan Kabupaten Temanggung dan lembaga penyelenggara yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.



## 2. Data Sekunder

Merupakan data yang dapat menunjang data primer. Data ini dapat ditemukan dari berbagai literatur seperti buku-buku referensi, jurnal, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini serta bahan informasi lainnya yang juga tentunya terkait dengan pokok bahasan yang akan diteliti.

### 1.7.3 Teknik pengumpulan data

Dalam bukunya Bungin (2007) mengungkapkan bahwa metode pengumpulan data kualitatif menggunakan metode pengamatan yang umumnya digunakan dari tradisi kualitatif seperti wawancara bertahap dan mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipasi (*participant observer*), dan lain-lain. Dalam penelitian kali ini, penulis akan menggunakan dua metode pengumpulan data, diantaranya ialah wawancara dan *desk study*.

#### 1.7.3.1 Wawancara

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai narasumber-narasumber yang terkait dengan faktor-faktor kemenangan anggota legislatif perempuan fraksi PKB dan PDIP pada Pemilu tahun 2014 di Kabupaten Pekalongan. Metode wawancara yang dilakukan kepada informan terkait dengan strategi keterpilihan calon anggota legislatif perempuan fraksi PDI-Perjuangan pada Pemilu Kabupaten Temanggung tahun 2014.

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara pada anggota DPRD Kabupaten Temanggung fraksi PDI-Perjuangan, yaitu kepada :

---

<sup>45</sup>Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana. Hal 111

- a. Ika Rizkiwati,
- b. Intan Kurniasari,
- c. Titik Winarti.

Kemudian Penulis juga mewawancara para anggota tim sukses, keberadaan tim sukses ini memiliki kaitan yang erat dengan anggota dewan perempuan yang terpilih. Penulis juga mendatangi lembaga penyelenggara Pemilu, yaitu KPU dan Panwaskab Kabupaten Temanggung. Kedua lembaga ini menjadi *focal point*, bagi terlaksananya Pemilu di Kabupaten Temanggung sendiri hingga ke masyarakat, karena kedua instansi ini secara langsung berkaitan dan melaksanakan proses Penyelenggaraan Pemilu.

Hasil wawancara ini memberi gambaran bagaimana strategi yang dilakukan oleh para calon anggota legislatif perempuan dari PDI-Perjuangan dalam meningkatkan elektabilitasnya pada persaingan Pemilu legislatif kabupaten Temanggung.

### **1.7.3.2 Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dengan cara mempelajari dan mencatat sejarah-sejarah atau hal-hal penting yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul berupa surat, berita online, media cetak, laporan, foto, dan lain sebagainya.

### **1.7.4 Analisis dan interpretasi data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles and

---

<sup>46</sup> Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal 244

Huberman. Miles and Huberman, aktivitas dalam analisis data kualitatif penelitian dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yang dilakukan meliputi:<sup>47</sup>

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keeluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Saat mereduksi data, peneliti dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.

b. *Data Display* (Display Data)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam hal ini, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Miles dan Huberman).

c. *Conclusion Drawing* / Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, Hal 246-252